

BAB IV

ANALISI DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis akan memaparkan hasil temuan dari fokus penelitian ini yaitu berita-berita kasus korupsi di sektor pemerintahan Indonesia melalui pengumpulan data yang telah dikumpulkan melalui berita di surat kabar Kompas.com sepanjang tahun 2017. Penulis juga akan memberikan pembahasan dan penjelasan atas hasil analisis dari data tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap obyek yang diteliti (Kountur, 2007). Dengan melakukan penelitian kualitatif melalui pendekatan deskriptif maka peneliti harus memaparkan, menjelaskan, menggambarkan data yang diperoleh oleh peneliti melalui pengumpulan data yang sudah dilakukan.

4.1 Profil Kompas.com

Kompas.com merupakan situs berita terpercaya di Indonesia. Hak cipta dan merek dagang Kompas.com dimiliki oleh PT Kompas Cyber Media, salah satu unit usaha Kompas Gramedia. Awalnya, Kompas.com berdiri pada tahun 1997 dengan nama Kompas *Online*. Saat itu, Kompas Online hanya berperan sebagai edisi internet dari Harian Kompas. Kemudian pada tahun 1998 Kompas Online mengganti namanya menjadi Kompas.com dan mulai berfokus pada pengembangan isi, desain, dan strategi pemasaran yang baru. Sejak saat itulah

Kompas.com memulai langkahnya sebagai portal berita terpercaya di Indonesia (Kompas,2018).

Sepuluh tahun kemudian, pada tahun 2008 Kompas.com tampil dengan perubahan penampilan yang signifikan. Mengusung ide “*Reborn*”, Kompas.com membawa logo, tata letak, hingga konsep baru di dalamnya. Menjadi lebih kaya, lebih segar, lebih elegan dan tentunya tetap mengedepankan unsur *user-friendly* dan *advertiser-friendly*.



Sinergi ini menjadikan Kompas.com sebagai sumber informasi lengkap, yang tidak hanya menghadirkan berita dalam bentuk teks, namun juga gambar, video, hingga live streaming. Perubahan ini pun mendorong bertambahnya pengunjung aktif Kompas.com di awal tahun 2008 yang mencapai 20 juta pembaca aktif per bulan, dan total 40 juta page views/impression per bulan. Saat ini, Kompas.com telah mencapai 120 juta *pageview* perbulan.



Pada tahun tersebut juga mulai ditampilkan channel-channel atau kanalkanal di halaman depan Kompas.com. Kanal-kanal ini didesain sesuai dengan tema berita dan membuat setiap pengelompokan berita memiliki karakter. Kanalkanal tersebut antara lain adalah:

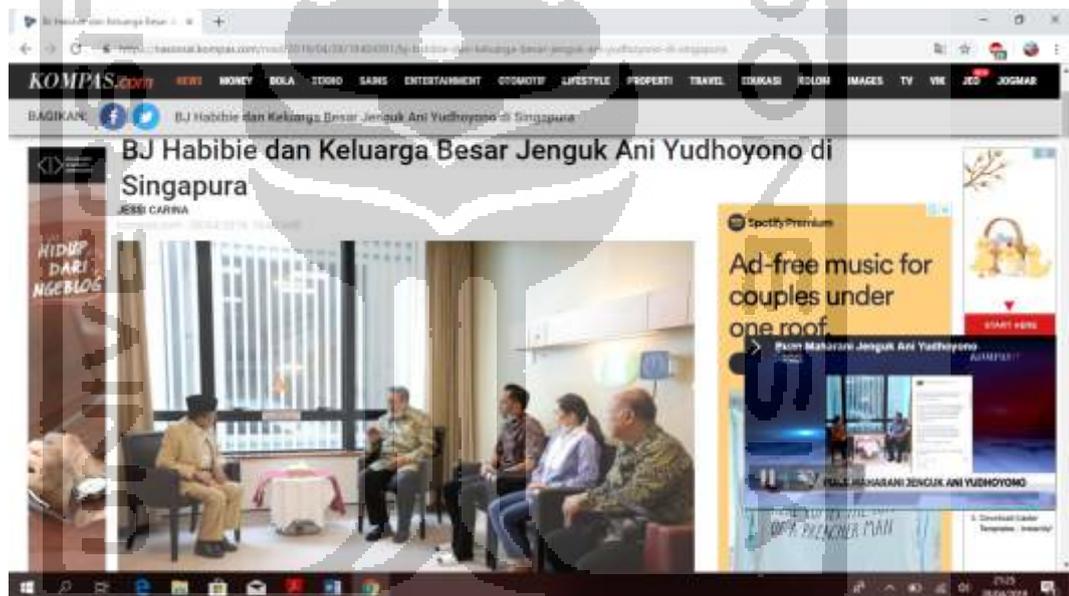
1. KOMPAS *Female* memuat informasi seputar dunia wanita: tips-tips seputar karier, kehamilan, trik keuangan serta informasi belanja
2. KOMPAS Bola tempat akurat untuk mengetahui update skor, berita seputar tim dan pertandingan sepak bola.
3. KOMPAS *Health* berisi tips-tips dan artikel tentang kesehatan, informasi medis terbaru, beserta fitur informasi kesehatan interaktif.
4. KOMPAS Tekno mengulas gadget-gadget terbaru di pasaran, menampilkan review produk dan beragam berita teknologi.
5. KOMPAS *Entertainment* menyajikan berita-berita selebriti, ulasan film, musik dan hiburan dalam dan luar negeri.

6. KOMPAS Otomotif menampilkan berita-berita seputar kendaraan, trend mobil dan motor terbaru serta tips-tips merawat kendaraan.
7. KOMPAS Properti memuat direktori lengkap properti dan artikel tentang rumah, apartemen serta tempat tinggal.
8. KOMPAS *Images* menyajikan foto-foto berita berkualitas dalam resolusi tinggi hasil pilihan editor foto Kompas.com.
9. KOMPAS *Karier Kanal* yang tak hanya berfungsi sebagai direktori lowongan kerja, namun juga sebagai *one-stop career solution* bagi para pencari kerja maupun karyawan.

Kompas.com juga telah menciptakan komunitas menulis dengan konsep citizen journalism dalam Kompasiana. Setiap anggota Kompasiana dapat mewartakan peristiwa, menyampaikan pendapat dan gagasan serta menyalurkan aspirasi dalam bentuk tulisan, gambar ataupun rekaman audio dan video. Kompasiana juga melibatkan kalangan jurnalis Kompas Gramedia dan para tokoh masyarakat, pengamat serta pakar dari berbagai bidang, keahlian dan disiplin ilmu untuk ikut berbagi informasi, pendapat dan gagasan. Kompasiana, yang setiap hari melahirkan 300 hingga 400 tulisan telah berhasil membangun komunitas jurnalisme warga yang mencapai 50.000.

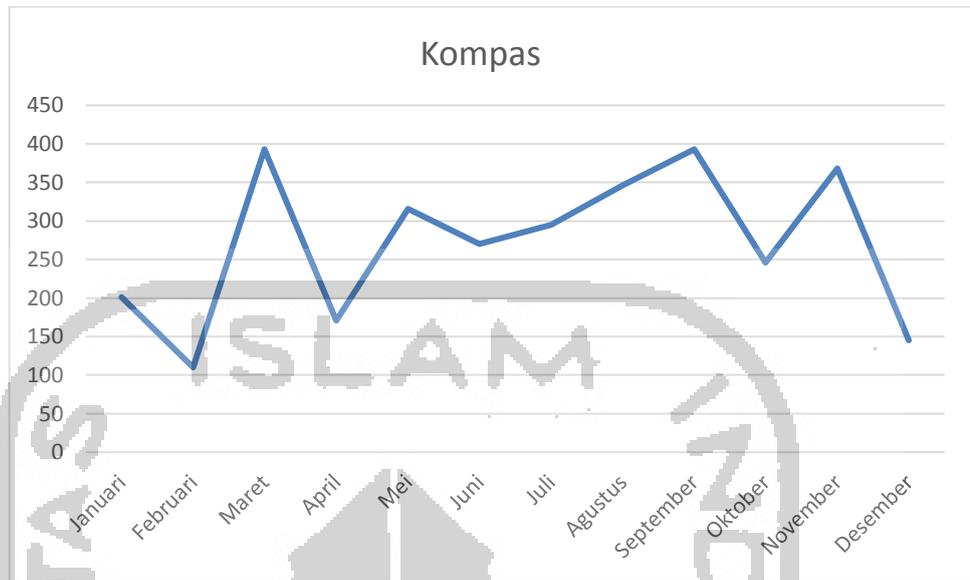
Sebagai portal berita yang mengikuti perkembangan teknologi terkini, kini selain bisa diakses melalui *handphone* atau dapat diunduh sebagai aplikasi gratis di *smartphone* BlackBerry, Kompas.com juga tampil dalam format iPad dan akan terus tumbuh mengikuti teknologi yang ada.

Pada tahun 2013, Kompas.com kembali melakukan perubahan yaitu, tampilan halaman yang lebih rapi dan bersih serta fitur baru yang lebih personal. Setiap orang memiliki preferensi dan kebutuhan berita yang berbeda. Kompas.com mencoba memahami kebutuhan pembaca yang beragam dengan menghadirkan fitur Personalisasi. Jadi, pembaca dapat dengan mudah memilih sendiri berita apa yang ingin mereka baca. Pada tahun 2016, Kompas.com berhasil masuk kategori 2016 *Newspaper Web Rankings / Asia* dalam *Top 100 Newspapers in Asia* dan menduduki peringkat 13 (www.4imn.com,2017).

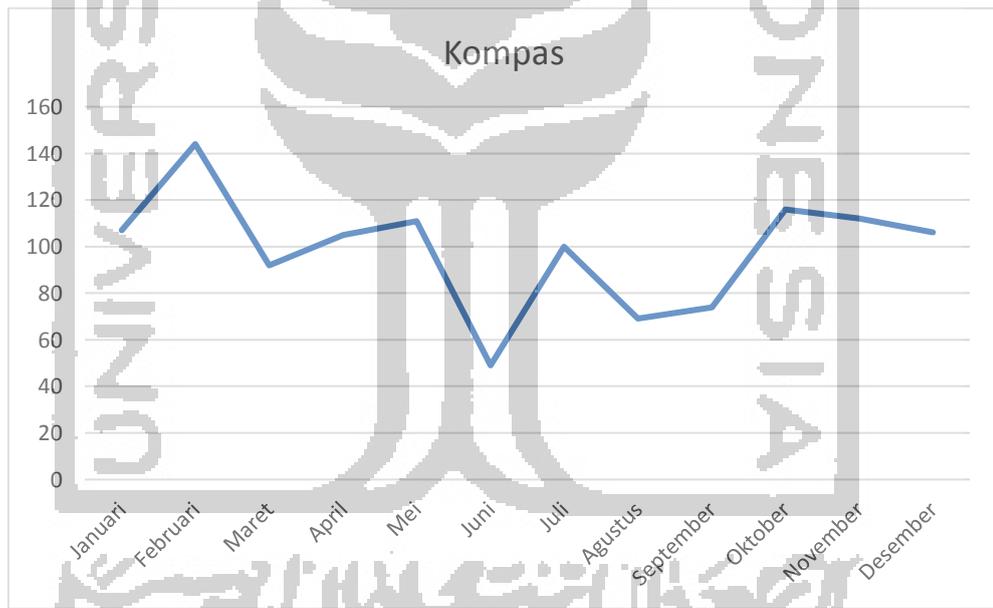


4.2 Hasil Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini adalah berita selama tahun 2017-2018 berdasarkan jenis-jenis kecurangan yang sudah dipilih. Pendistribusian tiap kecurangan atau disini lebih mengacu pada kasus korupsi pada sektor pemerintahan Indonesia ditunjukkan pada lima tabel yang masing-masing memperlihatkan hasil dari pengumpulan dan pengkelompokkan data yang dilakukan peneliti.



Gambar 4. Grafik berita selama tahun 2017 di Kompas.



Gambar 4.1 Grafik berita selama tahun 2018 di Kompas

4.2.1 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan pada Sektor Pemerintahan

Berdasarkan Bulan

Tabel 4.3
Distribusi surat kabar untuk kecurangan
pada sektor pemerintahan berdasarkan bulan tahun 2017

Bulan	Surat Kabar Kompas
Januari	201
Februari	110
Maret	393
April	171
Mei	316
Juni	270
Juli	295
Agustus	346
September	393
Oktober	246
November	368
Desember	145
Total	3254

Tabel 4.4
Distribusi surat kabar untuk kecurangan
pada sektor pemerintahan berdasarkan bulan tahun 2018

Bulan	Surat Kabar Kompas
Januari	107
Februari	144
Maret	92
April	105
Mei	111
Juni	49
Juli	100
Agustus	69
September	74
Oktober	116
November	112
Desember	106
Total	1185

Pada tabel 4.3 merupakan pendistribusian berita kasus korupsi di surat kabar Kompas.com berdasarkan bulan beredarnya berita tersebut. Berita dikumpulkan setiap hari dalam satu tahun dengan dikelompokkan perbulannya. Kemudian semua berita yang terkumpul di kelompokkan lagi ke beberapa bagian. Pada tabel pertama ini menunjukkan bahwa berita korupsi tertinggi diberitakan pada bulan Maret dan September yaitu ada 393 berita dibandingkan dengan pemberitaan kasus korupsi terendah pada bulan Februari ada 110 berita. Dari total pemberitaan mengenai tindak kecurangan yang terjadi pada sektor pemerintahan Indonesia pada tahun 2017 ada sebanyak tiga ribuan berita.

Pada table 4.4 merupakan pendistribusian berita kasus korupsi di surat kabar Kompas.com berdasarkan bulan beredarnya berita tersebut. Berita dikumpulkan dengan cara yang sama sehingga dapat menunjukkan bahwa berita korupsi tertinggi diberitakan pada bulan Februari yaitu 144 berita dibandingkan dengan pemberitaan kasus korupsi terendah pada bulan Juni ada 49 berita. Dari total pemberitaan mengenai tindak kecurangan yang terjadi pada sector pemerintahan Indonesia pada tahun 2018 ada sebanyak 1185.

Pada tahun 2017 kasus yang non-stop diberitakan yaitu kasus e-KTP dimana pada bulan Maret dan September merupakan puncak dari frekuensi pemberitaan tentang kecurangan juga memberitakan tentang kasus tersebut, pada bulan maret terdapat sebanyak 278 berita dan untuk bulan September ada sebanyak 195 berita yang memberitakan kasus e-KTP karena ternyata melibatkan sejumlah nama besar dan pejabat tinggi di pemerintahan Indonesia.

Pada Tahun 2018 kasus e-KTP juga masih diberitakan dan termasuk berita yang masih populer antara bulan Januari sampai dengan bulan April karena tersangka yang juga merupakan tokoh yang cukup terkenal di Indonesia yaitu Setya Novanto sudah di tangkap sejak oktober tahun 2017 namun masih melibatkan beberapa nama lain dan juga keluarganya. Disamping kasus tersebut ada kasus lain yang menyita perhatian public pada tahun 2018 yaitu kasus Gratifikasi yang dilakukan para pejabat di berbagai daerah.

Gubernur jambi yakni Zumi Zola yang terjerat dalam beberapa kasus suap, korupsi dan juga gratifikasi sangat menyita perhatian, sepanjang tahun 2018 nama Zumi Zola selalu muncul dalam pemberitaan. Puncaknya pada bulan Oktober terdapat 96 berita yang memberitakan kasus Gubernur Jambi tersebut, Zumi menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar. Zumi juga menerima 177.000 dollar Amerika Serikat dan 100.000 dollar Singapura. Selain itu, Zumi menerima 1 unit Toyota Alphard dari kontraktor. Dalam kasus ini, Zumi juga terbukti menyuap 53 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jambi, serta menyuap para anggota Dewan senilai total Rp 16,34 miliar.

Pada bulan Mei sampai dengan September berita yang paling banyak diberitakan dan cukup menyita perhatian publik adalah berita kasus korupsi proyek PLTU-Riau yang melibatkan direktur Perencanaan Korporat PT PLN Syofvi Felienty Roekman, Senior Vice President Legal Corporate PT PLN Dedeng Hidayat, mantan pejabat PT PLN Nicke Widyawati yang saat ini menjadi Direktur Utama PT Pertamina dan lain-lain. Eni dan Idrus telah divonis bersalah menerima suap Rp 4,75 miliar dari pemilik saham Blackgold Natural Resources

Johannes Budisutrisno Kotjo. Majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta menyatakan Eni dan Idrus menerima suap untuk membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1. Eni berperan memfasilitasi pertemuan antara Kotjo dengan Sofyan Basir. Sidang pembacaan dakwaan dalam perkara suap proyek PLTU Riau-dilakukan pada 4 Oktober 2018, Sidang akan berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dan sampai sekarang masih berlangsung.

Kemudian ada Bupati Mojokerto Mustofa Kamal Pasa yang juga terkena kasus pencucian uang. Pada perkara pertama, Mustofa diduga terlibat dalam dugaan penerimaan hadiah atau janji terkait pembangunan menara telekomunikasi di Kabupaten Mojokerto tahun 2015. Pada perkara kedua, Mustofa serta Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Mojokerto Zainal Abidin periode 2010-2015 diduga secara bersama-sama menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menjelaskan, dari penerimaan gratifikasi sebesar Rp 34 miliar, ditemukan adanya dugaan pencucian uang. Mustofa juga diduga menempatkan, menyimpan dan membelanjakan hasil penerimaan gratifikasi, berupa uang tunai Rp 4,2 miliar, kendaraan roda empat sebanyak 30 unit atas nama pihak lain.

4.2.2 Distribusi Kasus Kecurangan Berdasarkan Jenis-Jenis Kecurangan

Tabel 4.5
Distribusi kasus kecurangan berdasarkan jenis-jenis kecurangan tahun 2017

Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	3181
2	25
3	48
Total	3254

Tabel 4.6
Distribusi kasus kecurangan berdasarkan jenis-jenis kecurangan tahun 2018

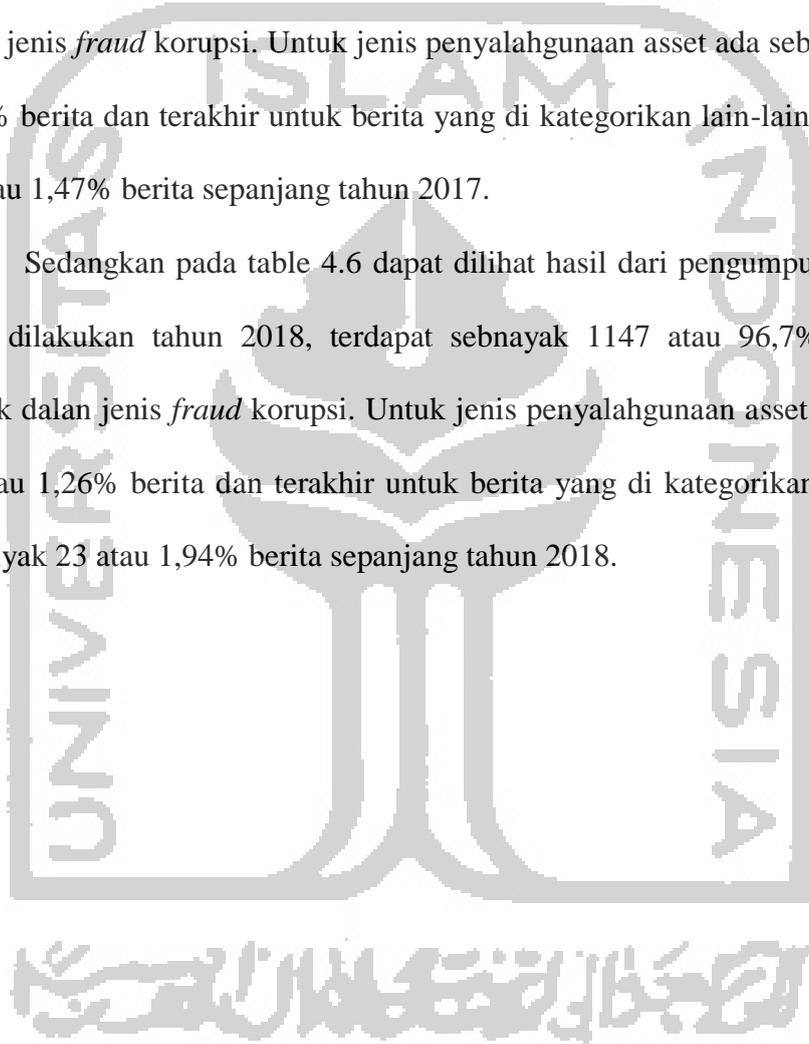
Jenis-jenis <i>Fraud</i>	Surat Kabar Kompas
1	1147
2	15
3	23
Total	1185

Adapun jenis kasus kecurangan atau penipuan yang melibatkan layanan publik yang diberitakan oleh surat kabar, penelitian ini telah mengkategorikan jenis-jenis kecurangan ke dalam tiga bentuk kecurangan yaitu Korupsi, Penyalahgunaan Aset dan Lain-Lain. Korupsi disini adalah perilaku tidak jujur oleh mereka yang memiliki kekuasaan dan sering kali melibatkan tindakan yang tidak terlegitimasi, tidak bermoral, atau tidak kompatibel dengan standar etis. Ada beberapa jenis korupsi contohnya adalah penyuapan dan persekongkolan tender. Penyalahgunaan aset disini adalah pencurian aset perusahaan atau lembaga oleh pegawainya dengan berbagai cara seperti penggelapan dana perusahaan. Untuk penelitian sebagian besar kasus yang diberitakan merupakan jenis kecurangan

tindak pidana korupsi diikuti kasus yang dengan jenis fraud Lain-Lain kemudian jenis fraud penyalahgunaan aset.

Pada table 4.5 dapat dilihat hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan tahun 2017 , terdapat sebanyak 3.012 atau 97,7 % berita yang masuk dalam jenis *fraud* korupsi. Untuk jenis penyalahgunaan aset ada sebanyak 25 atau 0,76% berita dan terakhir untuk berita yang di kategorikan lain-lain ada sebanyak 48 atau 1,47% berita sepanjang tahun 2017.

Sedangkan pada table 4.6 dapat dilihat hasil dari pengumpulan data yang telah dilakukan tahun 2018, terdapat sebanyak 1147 atau 96,7% berita yang masuk dalam jenis *fraud* korupsi. Untuk jenis penyalahgunaan aset ada sebanyak 15 atau 1,26% berita dan terakhir untuk berita yang di kategorikan lain-lain ada sebanyak 23 atau 1,94% berita sepanjang tahun 2018.



4.2.3 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan Berdasarkan Daerah di Indonesia

Tabel 4.7
Distribusi surat kabar untuk kecurangan berdasarkan daerah di Indonesia tahun 2017

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	2712	18	45	2775
Bengkulu	50			50
Malang	45			45
Maluku	41			41
Pamekasan	38			38
Kutai Kartanegara	25			25
Cilegon	25			25
Mojokerto	24			24
Tegal	23			23
Nganjuk	20			20
Sumatera Utara	20			20
Banten	16			16
Manado	15			15
Klaten	13			13
Jambi	13			13
Buton	11			11
Madiun	11			11
Banjarmasin	9			9
Sulawesi Tenggara	9			9
Sumatra Barat	8			8
Jawa Tengah	3			3
Papua	6			6
Jawa Timur	6			6
Komawe	7			7
Riau	6			6
NTB	3			3
Cimahi	6			6
Halmahera Timur	5			5
Bali	1			1
Kebumen	2			2
Aceh Barat		1		1
Dumai	2			2
Subang	1			1
Surakarta	2			2
Surabaya		2		2
Total	3188	21	45	3254

Keterangan: 1- korupsi
2-Penyalahgunaan Aset
3 -Lain-Lain

Tabel 4.8
Distribusi surat kabar untuk kecurangan berdasarkan daerah di Indonesia tahun 2018

Kota	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Jakarta	714	15	23	752
Jambi	39			39
Jawa Timur	37			37
Buton	36			36
Mojokerto	35			35
Kutai Kertanegara	29			29
Riau	27			27
Jawa Tengah	26			26
Kebumen	22			22
Sulawesi Tenggara	23			23
Sumatera Utara	19			19
Hulu Sungai	23			23
Maluku	14			14
Malang	12			12
Bengkulu	11			11
Sulawesi Utara	5			5
Banjarmasin	3			3
Kalimantan Tengah	6			6
Banten	4			4
Sumatera Barat	5			5
Surabaya	7			7
NTT	6			6
Bener Meriah (Aceh)	1			1
Jepara	2			2
Halmahera Timur	5			5
Subang	4			4
Nganjuk	4			7
Labuhan Batu	4			4
Cianjur	5			5
Cirebon	7			7
Madiun	6			6
Pasuruan	2			2
Papak Bharat (Sumtara Utara)	2			2
Papua	1			1
Ngada	1			1
Total	1147	15	23	1185

Keterangan: 1- korupsi
2-Penyalahgunaan Aset
3 -Lain-Lain

Pada table 4.7 ini memperlihatkan bagaimana kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia berdasarkan daerah atau kota yang tersangkut kasus korupsi. Sebagaimana dari hasil pengumpulan berita sepanjang tahun 2017 yang paling banyak diberitakan adalah kasus e-KTP yang terjadi di pemerintahan pusat yaitu Jakarta. Dari tabel bisa dilihat untuk kota Jakarta sebagai pusat pemerintahan Indonesia yaitu ada 2,775 berita karena kebanyakan berita kasus korupsi bertingkat pemerintahan pusat sehingga berita-berita tersebut dimasukkan ke kota Jakarta.

Sedangkan pada table 4.8 memperlihatkan bagaimana kasus-kasus korupsi yang terjadi di Indonesia berdasarkan daerah atau kota yang tersangkut kasus korupsi juga. Namun tidak ada perbedaan yang signifikan karena hampir sama dengan tahun 2017 kasus yang banyak diberitakan adalah kasus e-KTP dan terjadi di pemerintahan pusat yaitu Jakarta. Namun berita mengenai Gubernur Jambi Zumi Zola juga tidak sedikit diberitakan terkait kasusnya yang terjerat kasus suap, korupsi dan gratifikasi, disusul kota Mojokerto dengan kasus yang hampir serupa yaitu pencucian uang sebanyak Rp 34 miliar yang diduga bersumber dari hasil gratifikasi. Sehingga mantan Bupati Mojokerto tersebut, divonis 8 tahun penjara dalam perkara suap perizinan menara telekomunikasi di Mojokerto. Majelis hakim juga mewajibkan terdakwa membayar denda Rp 500 juta subsidi 3 bulan penjara.

Dari kedua tabel di atas terdapat beberapa daerah yang mengalami penurunan juga kenaikan dalam pemberitaan media mengenai tindak kecurangan sektor publik yaitu: Jakarta mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 2775 berita turun menjadi 752 berita pada tahun 2018, Jawa Tengah mengalami

kenaikan dari tahun 2017 sebesar 3 berita menjadi 26 berita pada tahun 2018, Maluku mengalami penurunan dari tahun 2017 sebesar 41 berita menjadi 14 berita pada tahun 2018, Jawa Timur mengalami kenaikan dari 2017 sebesar 6 berita menjadi 37 berita pada tahun 2018, Jambi mengalami kenaikan dari 2017 sebesar 13 berita menjadi 39 berita dan masih banyak lagi daerah-daerah yang mengalami hal serupa.



4.2.4 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan Berdasarkan Tingkat Pemerintahan

Tabel 4.9
Distribusi surat kabar untuk kecurangan berdasarkan tingkat pemerintahan

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	2712	18	45	2775
Daerah	476	3		479
Total	3188	15	23	3254

Keterangan:

- 1- korupsi
- 2- Penyalahgunaan Aset
- 3 -Lain-Lain

Tabel 4.10
Distribusi surat kabar untuk kecurangan berdasarkan tingkat pemerintahan

Tingkat Yuridiksi	Jenis-jenis <i>Fraud</i>			Total
	1	2	3	
Pusat	714	15	23	752
Daerah	433			433
Total	1147	15	23	1185

Keterangan :

- 1- korupsi
- 2- Penyalahgunaan Aset
- 3 -Lain-Lain

Sistem pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintahan pusat di Indonesia adalah penyelenggara pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni Presiden dengan dibantu seorang Wakil Presiden dan menteri-menteri negara. Sebagai lembaga legislatif pemerintahan pusat adalah DPR dan MPR.

Pemerintahan ini berkedudukan di Ibu Kota Negara Indonesia, yang saat ini adalah DKI Jakarta. Pemerintahan daerah adalah organisasi pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di daerah menurut asas otonomi seluasluasnya dan asas perbantuan dalam sistem NKRI. Penyelenggara pemerintahan daerah mencakup gubernur, bupati, walikota, dan perangkatan lainnya (kepala dinas, kepala badan, dan unit-unit kerja lain yang diatur oleh Sekretaris Daerah). Lembaga Legislatif yang berada di daerah, yaitu DPRD I untuk tingkat provinsi dan DPRD II untuk tingkat kabupaten dan walikota.

Pada tabel 4.9 dapat dilihat untuk tingkat pemerintahan pusat ada 2,712 atau 83,3 % dari total berita dengan jenis fraud korupsi, untuk jenis *fraud* penyalahgunaan aset sebanyak 18 berita dan untuk jenis lain-lain sebanyak 45 berita. Untuk tingkat pemerintahan daerah ada sebanyak 476 atau 14,6 % berita dengan jenis *fraud* korupsi, untuk yang termasuk jenis penyalahgunaan aset ada 3 berita saja dan tidak ada untuk jenis lain-lain. Jadi bisa dikatakan mayoritas kasus-kasus korupsi yang terjadi sepanjang tahun 2017 ini adalah pemerintahan pusat yang banyak terlibat dalam kasus korupsi. Dan tidak sedikit tokoh pemerintahan yang terlibat korupsi. Hal ini jadi gambaran seperti apa sebenarnya kinerja para pejabat negara yang sudah di beri amanah oleh masyarakat untuk mengurus negara kita. Walaupun tidak semua pejabat atau tokoh pemerintahan yang terlibat kasus korupsi tetapi tidak sedikit pula yang ikut serta dalam melakukan tindak kecurangan korupsi ini. Mayoritas kasus-kasus korupsi yang ada dilakukan berkelompok sehingga tidak sedikit yang terlibat dalam satu kasus korupsi

contohnya kasus e-KTP yang ternyata banyak sekali pejabat dan oknumoknum yang terlibat didalamnya.

Sedangkan pada table 4.10 untuk tingkat pmerintahan pusat ada 714 atau 60,2% dari total berita dengan jenis *fraud* korupsi, untuk jenis *fraud* penyalahgunaan aset sebanyak 15 berita dan untuk jenis lain-lain sebanyak 23 berita. Untuk tingkat pemerintahan daerah ada sebanyak 433 atau 36,5 % berita dengan jenis *fraud* korupsi , dan tidak ada untuk jenis penyalahgunaan asset dan lain-lain. Tidak ada perbedaan yang signifikan antara table 4.9 dan table 4.10.



4.2.5 Distribusi Surat Kabar untuk Kecurangan Berdasarkan Departemen-Departemen

Tabel 4.11
Distribusi surat kabar untuk kecurangan berdasarkan Departemen-departemen tahun 2017

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Kasus E-KTP (Kemendagri)	1673
2	Ditjen Pajak	71
3	Badan Keamanan Laut	57
4	DPR RI	31
5	Pemerintahan Kutai Kartanegara	20
6	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	57
7	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat	17
8	Pengadilan Negeri Jakarta Utara	7
9	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kebumen	5
10	Garuda Indonesia	45
11	Pertamina	8
12	PT PAL Indonesia	23
13	Pelindo II	3
14	Asuransi Jasindo	2
15	PT Garam	7
16	PT KAI	2
17	Perusahaan Listrik Negara (PLN)	2
18	Mahkamah Konstitusi	213
19	Perusahaan Umum Perhutani (Berdikari) Jawa Tengah	12
20	DPD RI	8
21	Ditjen P2KTrans Kementerian Tenaga Kerja	17
22	Menteri Kesehatan	71
23	Pemerintahan Provinsi DKI (Podomoro land)	14
24	Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)	8
25	Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan	5
26	Menteri Pemuda dan Olahraga(Hambalang)	21
27	Pemerintahan Daerah Madiun	15
28	Menteri Pertanian	11
29	Mahkamah Agung	6
30	Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	9
31	Kepala Kejaksaan Negeri Praya	3
32	Pemerintahan Daerah Cimahi	6
33	Pemerintahan Daerah Pamekasan	35

34	Dinas Pekerjaan Umum Papua	7
35	Atase Imigrasi	11
36	Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan	9
37	Pemerintahan Daerah Riau	5
38	Lain- Lain	54
39	Pemerintahan Daerah Tanggamus	5
40	Pemerintahan Daerah Klaten	22
41	Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat	4
42	Pemerintahan Daerah Nganjuk	10
43	Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara	25
44	Pemerintahan Provinsi Banten	25
45	Rumah Sakit Udayana	11
46	Kejaksaan Agung	18
47	Perlindungan Hortikultura Kementerian	5
48	Pertanian	1
49	Asian Games (INASGOC)	6
50	POLRI	44
51	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	3
52	Kwarda Pramuka DKI Jakarta	50
53	Ditjen Binmas Islam Kementerian Agama	21
54	Tentara Nasional Indonesia(TNI)	68
55	Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia	22
56	Pembangunan Daerah Tertinggal & Transmigrasi (PDDT)	22
57	Pemerintahan Provinsi Jawa Timur	10
58	Kejaksaan Tinggi Bengkulu	18
59	Bank Pembangunan Daerah Papua	32
60	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang JATIM	45
61	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara	32
62	Pemerintahan Daerah Malang	35
63	Kementrian Desa	24
64	Kementerian Hubungan	12
65	Pemerintahan Kota Tegal	9
66	Mahkamah Agung	22
67	PDAM Banjarmasin	10
68	Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional	3
69	Kementerian Dalam Negeri	70
	Total	3254

Tabel 4.12

Distribusi surat kabar untuk kecurangan berdasarkan Departemen-departemen tahun 2018

No	Departemen-departemen	Frekuensi
1	Kasus E-KTP (Kemendagri)	316
2	Pemerintah Provinsi Jambi	173
3	Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)	14
4	Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kebumen	22
5	Garuda Indonesia	16
6	Perusahaan Listrik Negara (PLN)	53
7	DPD RI	35
8	Otorisasi Jasa Keuangan (OJK)	21
9	Pemerintahan Daerah Riau	52
10	Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara	24
11	Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia	29
12	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)	13
13	Kementerian Dalam Negeri	7
14	Pemerintahan Kota Cirebon	12
15	Kementerian Luar Negeri	4
16	Pemerintah Kutai Kertanegara	26
17	Pemerintah Daerah NTT	8
18	Pemerintah Provinsi DKI (Podomoro Land)	22
19	Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	27
20	Pemerintah daerah Ngada	4
21	Pemerintah Daerah subang	7
22	DPR RI	32
23	Kementerian Hubungan	5
24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang JATIM	43
25	Pemerintah Provinsi Papua	2
26	Pemerintahan Provinsi Maluku	17
27	Pemerintahan Provinsi Bengkulu	28
28	POLRI	4
29	Pemerintah Daerah Hulu Sungai	5
30	Lain-lain	51
31	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara	24
32	Pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara	21
33	Kejaksaan Tinggi Tangerang	23
34	Pemerintahan Daerah Bener Meriah	12
35	Pemerintah Daerah Pakpak Bhener	11
36	Pemerintah Provinsi Sumatra Barat	22
	Total	1185

Berita yang dikumpulkan juga kemudian dikelompokkan berdasarkan departemen yang terlibat dalam pemberitaan kasus-kasus yang ada. Setelah pengumpulan data dilakukan, terkumpul sebanyak 69 departemen di pemerintahan Indonesia pada tahun 2017 dan 36 departemen pada tahun 2018. Pada tabel 4.11 dan table 4.12 ini memperlihatkan departemen-departemen atau pihak-pihak yang terlibat dalam kasus-kasus korupsi di Indonesia. Peringkat pertama yang paling banyak diberitakan yaitu Kementerian Dalam Negeri untuk kasus e-KTP. Karena proyek e-KTP itu sendiri merupakan proyek yang diselenggarakan oleh Kemendagri dan dipercayakan ke beberapa departemen lainnya. Tetapi sayangnya disalahgunakan oleh beberapa departemen yang terlibat dalam proyek e-KTP ini.

Kemudian untuk departemen kedua pada tahun 2017 yang paling banyak terlibat kasus korupsi yaitu Mahkamah Konstitusi. Ada dua hakim yang terlibat kasus korupsi di Mahkamah Konstitusi ini yaitu Akil Mochtar dan Patrialis Akbar. Akil Mochtar terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan menerima hadiah dan tindak pidana pencucian uang terkait kasus sengketa pilkada di MK yaitu pilkada Kabupaten Gunung Mas (Rp 3 miliar), Kalimantan Tengah (Rp 3 miliar), Pilkada Lebak Banten (Rp 1 miliar), Pilkada Empat Lawang (Rp 10 miliar dan 500.000 dollar AS), serta Pilkada Kota Palembang (sekitar Rp 3 miliar).

Sedangkan pada tahun 2018 departemen kedua yang paling banyak terlibat kasus yaitu pemerintah Provinsi Jambi yaitu Gubernur Jambi yakni Zumi Zola yang terlibat kasus korupsi, suap dan gratifikasi. Zumi Zola terbukti bersalah secara sah setelah menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar. Zumi juga

didakwa menerima 177.000 dollar Amerika Serikat, 100.000 dollar Singapura, dan satu unit Toyota Alphard.

4.3 Kasus Korupsi Yang Dilakukan Para Kepala Daerah

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah mengatakan salah satu penyebab maraknya kasus korupsi yang dilakukan kepala daerah adalah pengawasan di tingkat daerah yang tidak efektif. KPK berharap inspektorat tidak lagi segan dan tidak terhambat lagi untuk mengawasi wali kota atau bupati. Sebab, undang-undang mengatur status mereka independen dan bertanggung jawab bukan kepada atasan langsung, dalam hal ini wali kota atau bupati. Dari 105 kepala daerah yang kasusnya tengah ditangani KPK, 60 orang di antaranya terilit kasus suap, sementara sisanya terkait kasus yang merugikan keuangan negara, gratifikasi, hingga pemerasan. Masalah perizinan dianggap kerap menjadi batu sandungan para kepala daerah yang akhirnya terjerembap ke dalam kasus korupsi.

Selain Kasus e-KTP yang disoroti sepanjang tahun 2017 hingga hampir pertengahan 2018, kasus baru muncul yakni OTT para kepala daerah di berbagai penjuru daerah di Indonesia. Namun yang sangat menjadi daya Tarik wartawan yaitu Gubernur Jambi Zumi Zola yang terjerat kasus korupsi, suap dan gratifikasi, Gubernur nonaktif Jambi Zumi Zola didakwa menerima gratifikasi sebesar lebih dari Rp 40 miliar. Zumi juga didakwa menerima 177.000 dollar Amerika Serikat, 100.000 dollar Singapura, dan satu unit Toyota Alphard. Menurut jaksa, Zumi menerima uang melalui orang dekatnya, Apif Firmansyah sebesar Rp 34,6 miliar. Kemudian, melalui Asrul Pandapotan Sihotang yang merupakan orang kepercayaan Zumi sebesar Rp 2,7 miliar, uang 147.300 dollar AS dan 1 unit

Toyota Alphard. Selain itu, menurut jaksa, Zumi menerima uang dari Arfan selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemprov Jambi sebesar Rp 3 miliar dan 30.000 dollar AS serta 100.000 dollar Singapura.

Zumi Zola juga dinyatakan terbukti menyuap 53 anggota DPRD Jambi periode 2014-2019 dengan total Rp 16,34 miliar sebagai 'duit ketuk palu' agar DPRD Jambi menyetujui Raperda APBD tahun anggaran 2017 dan 2018 menjadi Perda APBD 2017 dan 2018. Selain itu Zumi juga terbukti melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP Pidana juncto Pasal 65 ayat (1) KUHP Pidana. Zumi Zola menerima vonis hakim dalam perkara gratifikasi dan korupsi uang ketok palu DPRD Jambi. Hakim memvonis Zumi Zola 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan dalam perkara tersebut.

4.4 Kesimpulan

Pemberitaan berita tindak kecurangan atau kasus korupsi lebih tepatnya pada sektor pemerintahan di Indonesia sangat menyita perhatian masyarakat dan banyak yang mengikuti alur perkembangan tiap kasus yang terjadi. Jika dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan di Malaysia pemberitaan di Indonesia mengenai kasus-kasus kecurangan ini jauh lebih banyak dari pada pemberitaan di Malaysia. Sudah menjadi pusat perhatian di media surat

kabar Indonesia karena pengelolaan dana publik merupakan perhatian publik. Bisa dilihat dari besar frekuensi pemberitaan di Kompas ini mengenai berita korupsi yang melibatkan berbagai pihak di pemerintahan pusat maupun daerah dan tidak sedikit negara kita dirugikan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan tamak atau rakus.

Itu semua terjadi karena kurangnya kesadaran yang dilakukan oleh para pelaku korupsi akan dampak yang terjadi dari lalainya mereka dalam mengemban amanah rakyat dan juga negara. Jika saja para koruptor bias benar-benar melakukan tugasnya sebagai penyambung aspirasi rakyat mungkin Indonesia sudah bias menjadi negara yang sejahtera.

Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti pola dan frekuensi pemberitaan tindak kecurangan pada sektor pemerintahan Indonesia untuk tahun 2017-2018 dilihat dari penelitian sebelumnya mengalami penurunan, dimana pada tahun 2017 total pemberitaan tindak kecurangan di pemerintahan Indonesia melalui surat kabar online kompas yaitu sebesar 3254 sedangkan pada tahun 2018 sebesar 1185.